



2 Menteri Panggil Ahok Bahas Gaji PNS

JAKARTA – Kenaikan gaji fantastis pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta masih menuai kontroversi. Ketimpangan gaji PNS Pemprov DKI Jakarta dengan daerah lain dikhawatirkan memicu kecemburuan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berencana bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk meminta penjelasan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang naik fantastik. "Kita undang saja BKD (Badan Kepegawaian Daerah) atau gubernurnya minta hadir. Kalau saya yang undang berarti gubernur. Kita undang untuk menjelaskan standardisasi gaji di DKI," kata Yuddy di Kementerian PAN-RB kemarin.

Dia mengatakan, paling cepat minggu ini akan mengundang Pemprov DKI Jakarta. Yuddy menjelaskan, kenaikan gaji yang fantastis tersebut menimbulkan pertanyaan dari kalangan PNS daerah lain. Perbedaan gaji yang sangat jauh antara DKI dan daerah lain secara tidak langsung berdampak secara psikologis. "Memang ada eksekusi psikologi sosial di PNS. Seolah-olah timpang," ucapnya.

Menurut Yuddy, persoalan penggajian sudah diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Komponen pertama adalah gaji yang besarnya sama di seluruh Indonesia. "Golongan I-IV itu sama rumusnya. Kalau gaji PNS yang baru di Jakarta Rp1,8 juta pasti sama di Papua," kata politikus Partai Hanura ini.

Yang membuat berbeda gaji PNS antara wilayah satu dan

lainnya adalah tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja didasarkan atas laporan akuntabilitas kinerja institusi. Nilainya berlaku secara kolektif. Sedangkan tunjangan kemahalan disesuaikan kondisi daerah masing-masing. "Sesuai pengelolaan PAD (pendapatan asli daerah) masing-masing. Kompromi daerah dengan DPRD dan potensi daerah. DKI mengelola Rp73 triliun dengan PAD yang besar jadi mereka memiliki pertimbangan sendiri untuk tata kelola pemerintahannya," tuturnya.

Yuddy menilai ada tunjangan yang tinggi tersebut sebenarnya memiliki dampak positif. Pemprov DKI Jakarta memiliki peluang memperoleh sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan cakap. "Maka untuk jadi lurah juga tidak gampang di DKI. Dituntut kerja profesional dan integritas. Maksudnya apresiasi ini kan agar tidak ingin korupsi dengan anggaran yang besar. Tidak memainkan proyek atau menyalahgunakan wewenang," ucapnya.

Gaji PNS DKI Jakarta naik cukup signifikan. PNS DKI Jakarta akan mendapatkan kenaikan gaji antara Rp5-40 juta. Dengan kenaikan tersebut, honorarium yang menghabiskan 30-40% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diadakan.

Berdasarkan data BKD, besaran *take home pay* pejabat

struktural seperti lurah yakni Rp33.730.000, naik Rp20 juta dari tahun lalu yang hanya Rp13 juta. Kemudian Camat Rp44 juta, naik sekitar Rp20 juta dari tahun lalu dan Walikota mendapat gaji Rp75,6 juta.

Untuk kepala dinas Rp75,6 juta, kepala badan Rp78,7 juta, dan kepala biro Rp70,4 juta. Gaji kepala biro, kepala dinas, dan

kepala badan ini naik Rp30-40 juta dari tahun lalu.

Sementara gaji pejabat eselon I setingkat sekretaris daerah dan deputi gubernur maksimal Rp96 juta atau meningkat Rp5 juta dari tahun sebelumnya. Jabatan operasional Rp13,6 juta meningkat sekitar Rp8 juta. Jabatan administrasi Rp17,8 juta meningkat Rp10 juta, dan jabatan teknis Rp22,6 juta atau meningkat Rp15 juta dari tahun lalu.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui besaran tunjangan PNS memang menjadi hak kepala daerah. Namun, pihaknya tetap akan mengkaji itu. "Kami belum bisa berikan tanggapan atau pernyataan secara tegas dan konkret. Kami segera ajak gubernur diskusi dulu, termasuk daerah lain," ungkapnya.

Senada dengan Yuddy, Tjahjo mengatakan, gaji memang sangat bergantung besaran PAD masing-masing daerah. Namun, dengan besaran gaji yang fantastis, diharapkan tidak memancing kecemburuan secara nasional. "Saya tidak mau tergesa-gesa ambil satu keputusan. Banyak aspek yang dipertimbangkan. Pencermatan awal timbulkan pro-kontra. Pendapat Pak Gubernur bisa kita pahami," ucapnya.

Di bagian lain, Ahok mengatakan, sebenarnya pemberian tunjangan kinerja dinamis (TKD) yang membuat penda-



DOK. KORAN SINDO

TJAHJO KUMOLO
Mendagri



DOK. KORAN SINDO

YUDDY CHRISNANDI
Menteri PAN dan RB

patan PNS meningkat fantastis itu bukan pemberesan. Pemberian TKD itu diambil dari anggaran honorarium yang besarnya 30-40% dari APBD. "Justru TKD ini menghemat APBD karena besarnya hanya 24%. Sebelum ada TKD, dulu pejabat *dapat* uangnya *enggak kelihatan* dan *enggak* merata. Hanya orang-orang tertentu pegang proyek yang *dapat*. Nah, sekarang kita potong itu honorarium," sebut Ahok di Balai Kota.

● **dita angga/
bima setiyadi**